

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Wilayah Perdesaan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan di bidang fisik, sosial ekonomi dan lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan dan pemerataan taraf hidup semua anggota masyarakat perdesaan tersebut, baik dari segi material maupun dari segi spiritual. Terdapat beberapa unsur dalam pembangunan wilayah pedesaan, salah satu unsur dalam pembangunan wilayah pedesaan adalah pembangunan pertanian (Asnawi, 1999).

Pembangunan pertanian merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat tani agar dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan pula kemandiriannya (Harjosarosa. P, 1981). Melalui kegiatan pembangunan pertanian, banyak sekali *multiplayer effect* yang ditimbulkannya, yaitu membantu pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat, selanjutnya juga dapat membantu menciptakan ketahanan pangan masyarakat (Subejo, 2012).

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar karena dapat menyerap tenaga kerja, mengatasi permasalahan pengangguran dan mendorong perekonomian masyarakat desa, karena sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan, oleh karena itu sebagian ahli sering mengaitkan pembangunan pertanian dengan pembangunan pedesaan (Simatupang, 1995). Menurut Yuwono, dkk (2011), pembangunan pertanian berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan atau mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, dimana kebutuhan ini merupakan salah satu hak asasi manusia.

Swasembada pangan, merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai melalui kegiatan pembangunan pertanian. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, swasembada pangan berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimiliki dan pengetahuan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan.

Komoditi yang diharapkan dapat mencapai swasembada diantaranya adalah padi yang akan menghasilkan beras. Program swasembada beras sudah dimulai semenjak zaman Orde Baru, dimana keberhasilan program tersebut dapat tercapai pada tahun 1984. Pada waktu itu, Indonesia mampu mencapai swasembada beras dan bisa mengekspor beras ke Negara tetangga. Keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 dibarengi dengan program penyuluhan pertanian yang lebih dikenal dengan program BIMAS untuk membantu pencapaian tujuan program. Hingga saat sekarang ini, pemerintah masih tetap menjadikan Indonesia swasembada beras, yaitu bahagian dari Program Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

Pencapaian tujuan pembangunan pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor-faktor yang bersifat mempercepat ataupun faktor-faktor yang melancarkan pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Pendidikan pembangunan atau lebih dikenal dengan nama penyuluhan pertanian merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian (Mosher, 1966). Penyuluhan pertanian juga menjadi jembatan antara

teori dengan praktek dan alat pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian (Mardikato, 2009).

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Ban & Hawkin, 1999). Penyuluhan pertanian sering di artikan sebagai suatu sistem pendidikan bagi masyarakat (petani) untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan serta perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakatnya (Mardikanto, 1993 dalam Mardikanto, 2009).

Penyuluhan pertanian diharapkan dapat berperan untuk membantu pencapaian Program Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional. Peranan penyuluh pertanian pada Program tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pertanian yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Pangan Strategis Nomor :141/Pementan/RC.220/4/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan Dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang menyatakan bahwa penyuluhan pertanian sebagai pengawalan dan pendampingan dalam kegiatan Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan Dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis.

Untuk mencapai swasembada pangan dan target peningkatan produksi padi, pemerintah telah mencanangkan program peningkatan produktivitas dan produksi pangan sejak tahun 2007 yang diawali dengan pencanangan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan target peningkatan produksi padi sebesar

5% per tahun, dan pada Tahun 2015 Pemerintah telah menetapkan target pembangunan pertanian yang salah satunya adalah tercapainya swasembada berkelanjutan padi. Target produksi yang harus dicapai pada Tahun 2015 adalah produksi padi sebesar 73,40 juta ton. Guna mencapai target tersebut, pemerintah melakukan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi dengan berbagai kegiatan yang meliputi: pembangunan/perbaikan jaringan irigasi tersier, percepatan optimasi lahan, bantuan alat dan mesin pertanian pra/pasca panen, bantuan benih dan pupuk, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), Pengawasan dan Pendampingan Terpadu oleh Penyuluh,

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mendukung tercapainya target swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu unsur penting dalam menggerakkan para petani (pelaku utama) untuk dapat menerapkan inovasi teknologi dalam rangka terlaksananya kegiatan upaya khusus peningkatan produksi padi.

Hampir seluruh wilayah sentral produksi beras di Indonesia menjalankan Program Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional. Salah satu wilayah yang mendapatkan prestasi dalam mencapai tujuan program tersebut, khususnya peningkatan produksi beras adalah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten tersebut berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat, dimana luas lahan di Kabupaten Padang Pariaman adalah 132.879 Ha dengan luas lahan pertanian padi sawah 27.089,5 Ha, dan daerah ini berada pada 2 - 1000 m dari permukaan laut (BPS Padang Pariaman, 2014). Produksi padi sawah Kabupaten

Padang Pariaman pada tahun 2014 sebanyak 294.045, 52 ton (BPS Padang Pariaman, 2015).

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu sentral produksi beras di Sumatera Barat. Keberhasilan daerah ini meningkatkan produksi berasnya dibuktikan dengan pemberian penghargaan kepada Bupati Ali Mukhni atas keberhasilan dalam peningkatan produksi beras di atas 5% pada tahun 2014. Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan peningkatan produksi beras sebesar 10 %, hal ini didasari dengan adanya pembangunan Irigasi Anai II yang membagi dua daerah Kabupaten Padang Pariaman. Irigasi Anai II ini akan selesai tahun 2015 yang akan mengairi lebih dari 7000 hektar masyarakat. (<http://padangpariamankab.go.id>).

Sistem tanam padi sawah yang diterapkan untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sistem tanam jajar legowo. Jajar legowo adalah salah satu cara tanam pindah padi sawah yang mengatur setiap dua barisan tanaman dan diselingi dengan satu barisan kosong (legowo). Tujuan cara tanam ini adalah untuk memanfaatkan radiasi matahari pada tanaman yang terletak di pinggir petakan, sehingga diharapkan seluruh tanaman memperoleh efek pinggir (border effect), memanfaatkan efek turbulensi udara yang bila dikombinasikan dengan sistem pengairan basah-kering berselang, maka dapat mengangkat asam-asam organik tanah yang berbahaya bagi tanaman dari bagian bawah ke bagian atas (menguap), meningkatkan kandungan karbon dioksida (CO₂) dan hasil fotosintesis tanaman, memudahkan dalam pemupukan dan pengendalian tikus, dan meningkatkan populasi tanaman per satuan luas (<http://binpers.com>).

Keberhasilan daerah ini meningkatkan produksi padi merupakan hasil kerja dari seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk juga penyuluh pertanian, dimana tugas penyuluh pertanian dalam kegiatan tersebut sebagai pendamping. Untuk melihat peranserta penyuluh pertanian dalam membantu peningkatan produksi beras Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilihat dari kinerja dari penyuluh pertanian tersebut. Kinerja ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara dan Prabu, 2000).

Gomes (2001) menyatakan bahwa kinerja seseorang dapat diukur dalam hal : (a) *Quantity of work*, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan; (b) *Quality of work*, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya; (c) *Job knowledge*, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya; (d) *Creativeness*, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul; (e) *Cooperation*, yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota organisasi); (f) *Dependability*, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja; (g) *Initiative*, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya; dan (h) *Personal qualities*, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi.

Baik atau tidaknya kinerja penyuluh pertanian dalam membantu peningkatan produksi beras di Kabupaten Padang Pariaman, dipengaruhi oleh

beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari diri penyuluh maupun dari luar diri penyuluh. Untuk membuktikan teori tersebut dengan fakta mengenai kinerja penyuluh dalam membantu peningkatan produksi beras di Kabupaten Padang Pariaman, dibutuhkan kajian yang komprehensif. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Kinerja Penyuluh Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Beras Petani Dalam Pencapaian Swasembada Pangan (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja penyuluh pertanian sebagai Pendamping dalam meningkatkan produksi padi dalam pencapaian Swasembada Pangan di Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Faktor - faktor apa yang menentukan kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping dalam meningkatkan produksi padi sebagai upaya pencapaian swasembada pangan di Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping dalam meningkatkan produksi padi sebagai upaya pencapaian swasembada

pangan di Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Mendeskripsikan faktor - faktor yang menentukan kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping dalam meningkatkan produksi padi sebagai upaya pencapaian swasembada pangan di Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, agar dapat menambah khazanah pengetahuan tentang kinerja penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi padi di Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
2. Bagi penyuluh, agar dapat melakukan introspeksi dan selanjutnya memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah di daerah, tentang kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping program Swasembada Pangan khususnya Padi di Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menyumbangkan data dan informasi tentang kinerja penyuluh pertanian.